



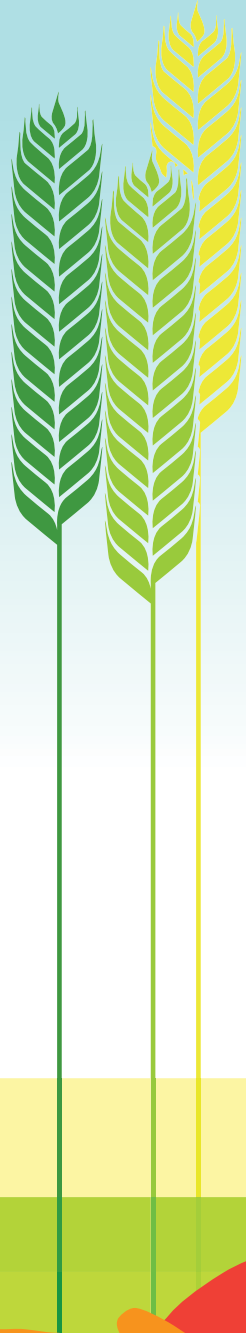
DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



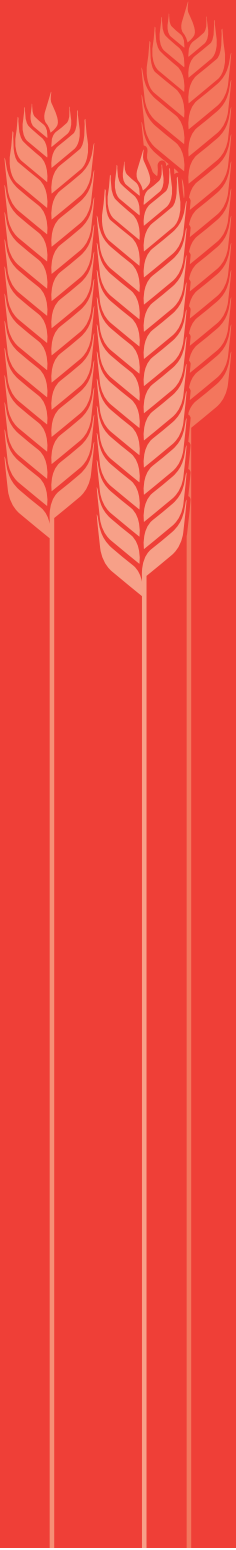
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PANDUAN PENYUSUNAN

“Pengintegrasian Isu Gender ke Dalam Sistem Perencanaan & Penggangan Pembangunan Pertanian”



2009



PANDUAN PENYUSUNAN

“Pengintegrasian Isu Gender ke Dalam Sistem Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Pertanian”

PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER :

perencanaan yang dilakukan dengan memasukan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Dalam rangka menyelenggarakan perencanaan yang responsif gender perlu dilakukan analisis gender pada semua kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan.

ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER :

untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan. Dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu partisipasi perempuan dan laki-laki secara aktif dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

TIM PENYUSUN

KONSULTAN : 1. Ir. Hj. Rini Soerojo Soemarno
2. Dra. Hj. Suharti MS, MM

NARASUMBER

Departemen Pertanian : 1. Ir. Yulistiana Endah Utami, MSc, M.Phil
2. Ir. Rita Nur Suhaeti, MSi
3. Ir. Teguh Seno Adji
4. Ir. Cut Ratna
5. Dra. Endang Werdiningsih

KPP dan PA : 1. Dra. Sri Danti, MA
2. Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM

Pakar : Dr. Yulfitra Rahardjo APU

KONTRIBUTOR

Departemen Pertanian : 1. Ir. Cut Ratna
2. Dra. Endang Werdiningsih

KPP dan PA : 1. Ir. Siti Khadijah Nasution, MM
2. Dra. Vakentina Ginting, MSc
3. Ir. Endah Prihatiningtyastuti, Msi
4. Rohika Kurniadisari, SH, Msi
5. Zam Zam Muchtarom, SH, MM

EDITOR : Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

DITERBITKAN OLEH : Deputi Bidang PUG Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan

DISAIN DAN LAYOUT : **interaxi**

ISBN : **978-979-3247-42-7**

Kata Pengantar

Sektor pertanian sampai saat ini masih merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian juga masih menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat, terutama di pedesaan. Namun produktivitas sektor pertanian masih relatif rendah, karena disamping pengaruh faktor teknik produksi dan ekonomi, juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat yang belum mendukung perkembangan sektor pertanian secara optimal.

Salah satu permasalahan sosial budaya yang dihadapi sektor pertanian di lapangan adalah belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses produksi, baik di on-farm maupun off-farm. Saat ini banyak generasi muda yang tidak tertarik lagi kepada pertanian. Di sisi lain, banyak kegiatan dan peluang usaha pertanian yang sesuai bagi wanita tani, namun belum dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti kegiatan pasca panen, pengolahan hasil skala rumah tangga, pemasaran produk, pengelolaan lembaga keuangan mikro di pedesaan serta kegiatan bernilai tambah tinggi lainnya.

Berdasarkan kondisi diatas, maka sudah selayaknya Kementerian/Lembaga (K/L) dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang membidangi pertanian untuk mengarahkan dan mendorong segenap upaya yang dapat mempercepat proses peran serta setiap pelaku pembangunan pertanian (laik-laki, perempuan, tua maupun muda) dalam proses pengambilan keputusan untuk bekerja atau berusaha di bidang pertanian. Melalui proses peran serta ini diharapkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat terakomodasi dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Konsep gender dan pengarusutamaan gender telah cukup lama dikembangkan di lingkungan Departemen Pertanian. Saat ini sudah terbentuk Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Pertanian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal. Sebagai tindak lanjutnya, sudah diterbitkan beberapa publikasi yaitu : Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian dan Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Dalam Rencana Aksi Pembangunan Pertanian. Di samping itu, sudah banyak pula kegiatan sosialisasi PUG yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan SKPD dan instansi lain yang terkait dengan pembangunan pertanian.

Penduan Penyusunan Pengintegrasian Isu Gender Ke Dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini adalah merupakan hasil kerjasama antara Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan Tim Perencanaan lingkup Departemen Pertanian. Panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk sektor Pertanian.

Akhirnya, saya sangat mengharapkan agar panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perencana lingkup pertanian baik di pusat maupun daerah sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran. Kepada Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini saya sampaikan penghargaan dan terimakasih.

Jakarta, Nopember 2009
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender telah diamanahkan dalam Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Untuk percepatan pelaksanaannya didukung dengan kebijakan Departemen Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 119 tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan RKA-KL Tahun 2010, dan untuk tahun 2010, ditetapkan tujuh departemen sebagai pilot project pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang responsif gender, di mana Departemen Pertanian menjadi salah satu pilotnya.


Bahan tulisan ini berasal dari serangkaian hasil FGD, konsultasi ke masing-masing unit unit kerja untuk menemu kenali masing-masing isu gendernya, workshop aplikasi penyusunan dokumen Gender Budget Statement, dan beberapa seri workshop pembahasan draft panduan. Aplikasi penyusunan dokumen Gender Budget Statement dilakukan secara partisipatif bersama direktorat di jajaran Departemen Pertanian, dan sebagian hasilnya merupakan contoh yang di muat dalam lampiran.

Upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dalam menindaklanjuti Kebijakan Permenkeu no. 119 tahun 2009 adalah menetapkan satu panduan tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Departemen Pertanian. Panduan tersebut merupakan hasil kerjasama yang solid antara komponen perencana jajaran Departemen Pertanian, Tim Pokja PUG Departemen Pertanian serta Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada semua program dan kegiatan di Departemen Pertanian, agar semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang Pertanian menjadi responsif gender.

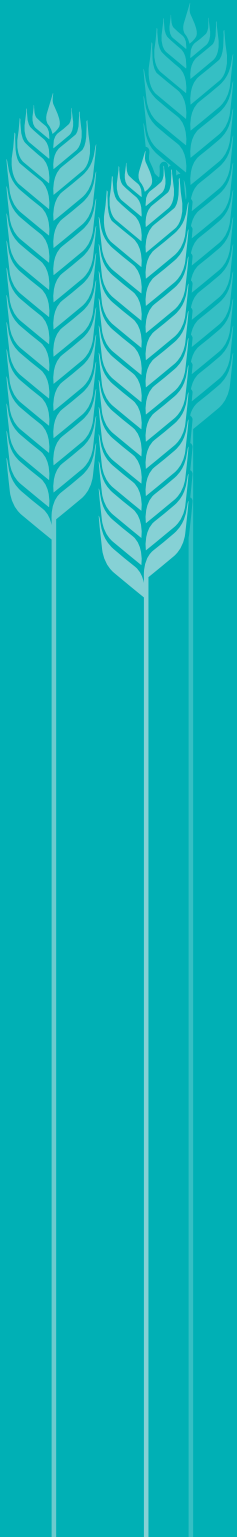
Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Panduan yang berasal dari seluruh pihak dari Departemen Pertanian, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara khusus terima kasih atas bantuan dari para konsultan yang telah menuangkan dan meramu segala ide dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait kedalam penyusunan panduan ini.

Penuh harapan kami, panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak pada jajaran Departemen Pertanian.

Jakarta, Desember 2009
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender



Dra. Sri Danti, MA



Daftar Isi

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian	i
Kata Pengantar Deputi Bidang PUG, KNPP&PA	iii
Daftar Isi	v
DAFTAR TABEL/ BAGAN/ KOTAK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I.	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran	2
BAB II.	
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP dan KETERKAITAN ANATARA PUG DENGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	5
A. Pengertian	5
B. Ruang lingkup	6
C. Keterkaitan antara PUG dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Sektor Pertanian	6
D. Isu Gender di dalam Terms of Reference (TOR)	10
BAB III.	
MEKANISME PENYUSUNAN PPRG DAN IMPLEMENTASI DI BIDANG PERTANIAN ..	13
A. Identifikasi Dokumen Perencanaan Yang Telah Disusun	13
B. Perumusan Masalah Dalam Penyusunan Rencana	14
C. Advokasi Dan Sosialisasi	14
D. Pelaksanaan	15
E. Monitoring Dan Evaluasi	15
F. Indikator Keberhasilan	18
BAB IV.	
PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA	23

Daftar Tabel/Bagan/Kotak

Tabel	: Contoh Anggaran yang Responsif Gender	10
Bagan 1	: Proses Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kinerja Pembangunan Pertanian	8
Kotak	: Analisis Gender program/kegiatan	11
Bagan 2	: Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Bidang Pertanian	17

Daftar Lampiran

Lampiran 1.a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penulisan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010	27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Lampiran 1.b.

Daftar Petani Sampel	29
--------------------------------	----

Lampiran 2

Analisis Gender Di Bidang Pertanian	33
-----------------------------------------------	----

Lampiran 3

Contoh Aplikasi Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender di Bidang Pertanian	49
---------------------------------------------------------------------------------------------	----

Bab I.

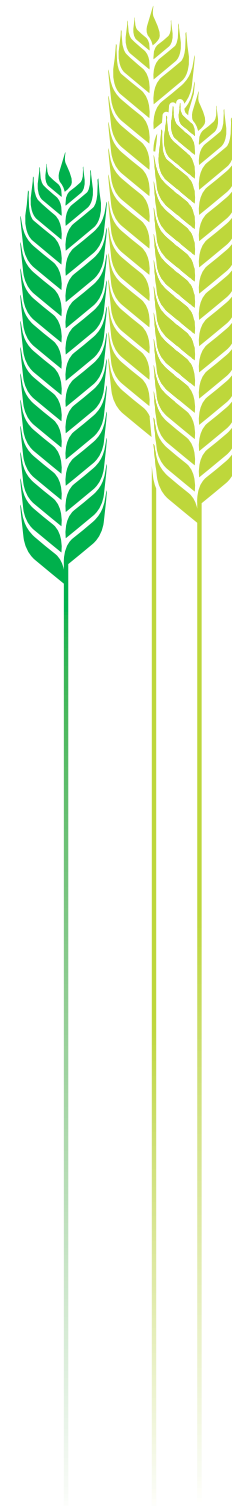
Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sejak Program Pembangunan Nasional (Propenas) disusun dan dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), upaya untuk menginkorporasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program-program pembangunan nasional terus dilakukan. Secara lebih spesifik, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, semua pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) diinstruksikan untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, Departemen Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan pertanian, telah merancang berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tolak ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator pencapaian pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Program dan kegiatan pembangunan pertanian dirancang mengarah kepada upaya peningkatan peran serta masyarakat. Hal tersebut secara tegas telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Proses Pembangunan yang diperkuat oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Penerapan PUG dalam pembangunan pertanian baik di tingkat kebijakan sampai implementasinya masih belum dilaksanakan secara optimal, karena masih terdapat berbagai kesalahpahaman dalam memaknai pengertian gender dan isu gender. Sebagai



akibatnya, komitmen pemerintah pusat dan daerah kurang mendukung penyelenggaraan pembangunan yang memberikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Padahal PUG merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mencapai sasaran penerapan perencanaan program dan anggaran yang berbasis kinerja. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya advokasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada semua jajaran di lingkup Departemen Pertanian.

Untuk memperbaiki kondisi akses, kesenjangan, partisipasi serta kontrol dalam pengambilan keputusan, dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki perlu dilakukan penerapan perencanaan dan penganggaran yang mengakomodasi upaya penciptaan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dalam pembangunan telah diterbitkan Permenkeu Nomor : 119/PMK-02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010.

Selanjutnya Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang dilengkapi Kerangka Acuan Kegiatan/TOR dan Pernyataan Anggaran Gender (GBS). Dengan GBS kegiatan/sub kegiatan dan anggaran K/L yang tertuang di dalam DIPA akan responsif gender. Pernyataan Anggaran Gender merupakan suatu dokumen yang menginformasikan suatu program/kegiatan/sub kegiatan telah responsif gender dan didahului dengan analisis gender yang sesuai, antara lain *Gender Analysis Pathway (GAP)*, Kerangka Analisis Harvard, dan atau *Socio-economic and Gender Analysis (SAGA)*.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Panduan Penyusunan Pengintegrasian Isu Gender Kedalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pertanian dimaksudkan sebagai acuan bagi para perencana pembangunan pertanian dalam menerapkan PPRG dalam program, dan kegiatan, serta sub kegiatan yang dibiayai dari APBN Departemen Pertanian.

2. Tujuan

Tujuan panduan ini adalah: (1) menyamakan persepsi para penentu kebijakan dan perencana dalam menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang responsif gender; (2) memberikan arahan dan batasan tentang ruang lingkup pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan anggaran yang responsif gender; serta

(3) menerapkan perencanaan dan penganggaran kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender.

3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari penerapan panduan ini adalah : (1) tersusunnya perencanaan dan penganggaran kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di bidang Pertanian; (2) diterapkannya anggaran responsif gender dalam kegiatan pembangunan pertanian; (3) meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan pertanian; serta (4) meningkatnya produktivitas bidang pertanian melalui keterlibatan segenap pelaku pembangunan pertanian dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan proses produksi.

Bab II.

Pengertian, Ruang Lingkup dan Keterkaitan Antara PUG dengan Perencanaan dan Penganggaran

A. PENGERTIAN

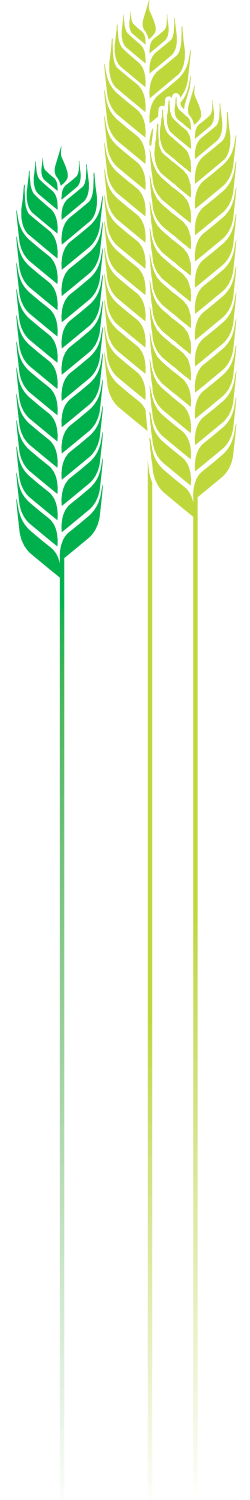
Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Istilah “gender” digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentuk budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan Gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah salah satu strategi pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Konsep PUG harus melibatkan langsung perempuan dan laki-laki secara proporsional melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi dalam semua bidang pembangunan.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender).



Gender Budget Statement (GBS) adalah bagian dari dokumen perencanaan anggaran yang menginformasikan suatu kegiatan/sub kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan/sub kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS merupakan bagian dari Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang biasa disebut terms of reference (TOR).

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pendekatan yang lebih menekankan pada masalah keadilan dan kesetaraan dalam perencanaan dan penganggaran. Keadilan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. PPRG bekerja dengan cara menelaah dampak dari perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan/sub kegiatan terhadap peran perempuan dan laki-laki. Disamping itu, guna menganalisis apakah alokasi perencanaan dan penganggaran tersebut telah menjawab kebutuhan, dan permasalahan perempuan serta kebutuhan, dan permasalahan lelaki secara adil. PPRG melekat pada struktur program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKA-KL. Hanya saja substansi kegiatan/sub kegiatan dalam struktur RKA-KL tersebut dilihat dari sudut pandang/perspektif gender. Oleh karena itu, tujuan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah menghasilkan suatu perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif, berkeadilan serta mendorong akuntabilitas pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender menuju “*Good Governance*”.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mencakup: (1) tahapan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender mulai dari penelaahan usulan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembahasan rancangan program kegiatan dan sub kegiatan sampai aplikasi penyusunan anggaran (RKA-KL) Eselon I lingkup Departemen Pertanian mulai tahun anggaran 2010; (2) analisis gender di bidang pertanian; serta (3) contoh aplikasi perencanaan dan penganggaran responsif gender di bidang pertanian.

C. KETERKAITAN ANTARA PUG DENGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM SEKTOR PERTANIAN

Sumberdaya manusia adalah pelaku utama dalam pembangunan. Khusus di sektor pertanian, peranan tenaga kerja keluarga seringkali belum diperhitungkan. Anggota keluarga yang terlibat (termasuk perempuan dan anak) dalam memberikan kontribusi cukup besar

dalam proses produksi, juga mereka sering termarginalisasikan dari akses terhadap berbagai sumber daya produktif, serta berbagai pelayanan penting dan pengambilan keputusan. Upaya yang tepat untuk mempersempit kesenjangan gender adalah dengan melakukan intervensi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan pertanian yang harus mempertimbangkan peran dan kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman maupun persepsi yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki di bidang pertanian, termasuk kelompok umur (pemuda tani).

Program/kegiatan/sub kegiatan pertanian harus memperhatikan berbagai kendala relasi gender yang dihadapi oleh perempuan maupun laki-laki, khususnya faktor-faktor yang membatasi partisipasi salah satu pelaku dalam pelaksanaan, dan pengelolaan program/kegiatan/sub kegiatan. Jika tidak dapat mempertimbangkan berbagai perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kurang efisien dan efektif pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi untuk mempercepat pencapaian keaprogan/kegiatan yang responsif gender, sehingga dapat mengakomodasikan seluruh pelaku pembangunan. Salah satu strategi tersebut adalah PUG.

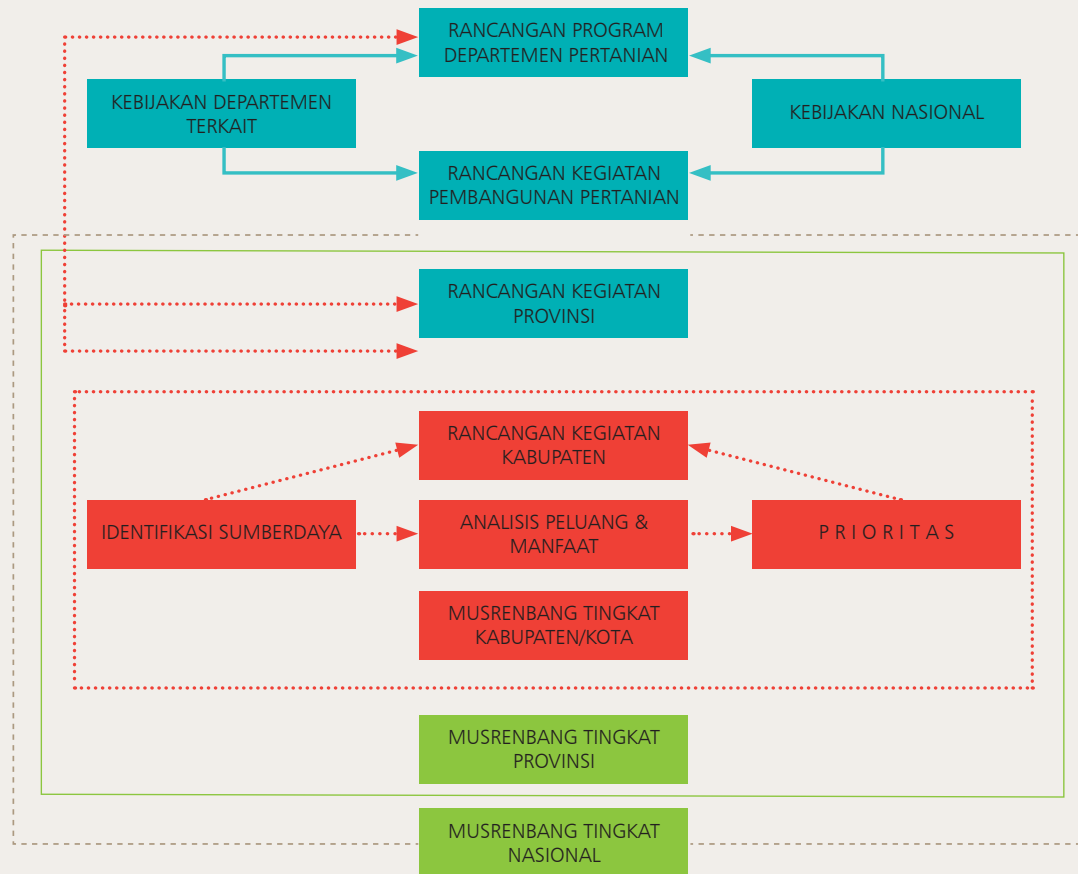
Dalam menerapkan strategi PUG seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah terhadap strategi PUG sesuai dengan bidangnya masing-masing; (2) memelihara kesinambungan sosialisasi dan menciptakan jaringan perspektif gender yang dapat dijadikan "mitra/sahabat" dalam memperjuangkan KKG; (3) membuat berbagai model pendidikan yang dapat membangun kesadaran secara berjenjang mulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah sampai masyarakat luas; dan (4) memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi gender seperti stereotipi, marginalisasi, subordinasi, fungsi ganda dan beban kerja berlebihan serta korban tindak kekerasan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG sehingga semua pihak memperhatikan perspektif gender dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan dengan cara:

- (i) Mengkoordinasikan usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender yang diajukan dalam forum Musrenbang dan Forum SKPD di semua tingkat pembahasan, yaitu sejak dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Provinsi dan Nasional.
- (ii) Memformulasikan bahan rumusan kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender, yaitu program yang akan dilakukan untuk mengakomodasikan kebutuhan, aspirasi, permasalahan, dan pengalaman laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin. Intervensi tersebut harus tepat sasaran, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi, diskriminasi, termasuk sub-ordinasi, beban ganda dan tindak kekerasan.

Proses pengintegrasian isu kesenjangan gender dilakukan pada saat membahas usulan program yang diajukan dalam Musrenbang atau Forum SKPD di semua level pembahasan di bidang pertanian terangkum dalam bagan berikut:

Bagan 1: Proses Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kinerja Pembangunan Pertanian



Rumusan bahan kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dan mendapatkan alokasi anggaran kemudian ditindaklanjuti dalam dokumen RKA-KL. Sesuai Permenkeu No.119/PMK-02/2009 perlu diangkat ada/tidaknya isu kesenjangan gender dan perlunya gambaran perbaikannya tercermin dalam uraian analisis situasi yang ada dalam GBS maupun isu gender dalam Kerangka Acuan Kegiatan (TOR). Analisis situasi dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:

- Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan/subkegiatan pertanian;
- Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- Indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;
- Indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan

Berdasarkan tahap perkembangan pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia ternyata pemahaman gender masih bias kepada perempuan. Namun arah perencanaan dan penganggaran saat ini sudah berorientasi gender yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut, yaitu:

- (1) Anggaran kesetaraan gender, merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender;
- (2) Anggaran spesifik perempuan, yaitu alokasi anggaran yang secara khusus diperuntukan bagi perempuan;
- (3) Anggaran untuk afirmatif action. Alokasi anggaran ini diperuntukan jika berdasarkan analisis gender diperlukan program/kegiatan yang merupakan perlakuan khusus sementara;
- (4) Anggaran pelembagaan untuk kesetaraan gender. Merupakan alokasi anggaran untuk melembagakan PUG, baik dalam hal pendataan maupun capacity building.

TABEL: Contoh Anggaran Yang Responsif Gender di Bidang Pertanian

KATEGORI	KEGIATAN	Kode Rek.	SKPD
Anggaran Spesifik gender (1)	Pelatihan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk kelompok wanita tani	2.01.xx.25.06	Dinas Pertanian
	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	1.22xx.19.01	Dinas Pertanian
Anggaran Afirmasi & peningkatan kapasitas (2)	Pelatihan participatory rural appraisal bagi penyuluh pertanian perempuan	2.01.xx.20.04	Dinas Pertanian
	Penyusunan data pilah kontribusi ekonomi dari sektor pertanian	1.11.xx.10	BPM & Bagian PP
Anggaran secara Umum (3)	Promosi atas hasil produksi pertanian, dengan pelibat KTW	2.01.xx.17.07	Dinas Pertanian
	Penanganan daerah rawan pangan	2.01.xx.16.01	Dinas Pertanian

D. ISU GENDER DALAM TERMS OF REFERENCE (TOR)

Untuk menjamin usulan dan rancangan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan, maka TOR harus memuat:

- (i) Latar Belakang yang menjelaskan permasalahan KKG yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
- (ii) Tujuan Kegiatan/sub kegiatan yang secara jelas memberikan informasi tentang upaya yang mencerminkan penurunan kesenjangan gender, sehingga kelompok sasaran akan menerima manfaat kegiatan secara berkeadilan; dan
- (iii) Pelaksanaan Kegiatan/sub kegiatan yang menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran; dan
- (iv) Penetapan kelompok sasaran, output kegiatan/sub kegiatan, lokasi kegiatan/sub kegiatan serta identifikasi output yang harus sesuai dengan tujuan kegiatan/sub kegiatan.

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian dari TOR dan tetap memakai alat analisis seperti biasanya (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun analisis gender dapat dilihat dalam kotak berikut:

Analisis Gender Program/Kegiatan

KOTAK:

- » Apa yang dilakukan kaum laki-laki dan perempuan (dewasa, anak-anak, orang berusia lanjut), dan di mana serta kapan kegiatan-kegiatan ini dilakukan.
- » Siapa yang memiliki akses dan pengendalian terhadap sumber daya dan pelayanan, serta pembuatan keputusan.
- » Bagaimana pola kegiatan, akses, dan pengendalian dibentuk oleh faktor-faktor struktural (demografi, ekonomi, hukum, dan institusional) dan factor budaya, agama, serta perilaku?
- » Mengapa perencanaan, perancangan, implementasi, pemantauan (monitoring), dan pasca-evaluasi yang peka-gender

Untuk melengkapi TOR, harus melampirkan GBS yang menginformasikan suatu kegiatan/sub kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan/sub kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Analisis situasi isu gender tersebut harus digambarkan dalam sub-kegiatan dalam format GBS. Isi GBS mencakup:

- **program:** adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi dalam satu (1) instansi, untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran;
- **kegiatan:** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan, pengerahan sumberdaya (manusia, bahan dan alat, dana, teknologi) sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
- **sub-kegiatan:** adalah bagian dari kegiatan yang berisikan tahapan kegiatan;

- **analisis situasi:** diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak ada, bisa hanya berupa gambaran bahwa sub-kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai pengaruh terhadap kelompok sasaran.
- **perencanaan kegiatan/sub kegiatan:** dipilih hanya pada Grup Akun yang secara langsung mengubah kondisi kesenjangan gender kepada arah yang lebih baik;
- **grup akun:** berisikan bagian atau tahapan kegiatan/sub kegiatan yang diharapkan dapat menangani masalah gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi. Dalam kolom grup akun dapat diisi dengan bagian/tahapan kegiatan/sub kegiatan atau lokasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi;
- **indikator input:** adalah jumlah sumberdaya seperti dana, SDM, peralatan dan bahan, serta masukan lain yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan/sub kegiatan. Dalam kolom indikator input minimal berisikan 1 (satu) indikator untuk bagian/tahapan kegiatan/sub kegiatan yang relevan dengan masalah gender yang telah diidentifikasi;
- **indikator output:** adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran program dan kebijakan. Dalam kolom indikator output minimal berisikan 1 (satu) indikator output untuk bagian/tahapan kegiatan/sub kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi; dan
- **indikator outcome:** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program. Dalam kolom indikator outcome minimal berisikan 2 (dua) indikator outcome untuk bagian/tahapan kegiatan/sub kegiatan yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi.

Bab III.

Mekanisme Penyusunan PPRG dan Implementasi di Bidang Pertanian

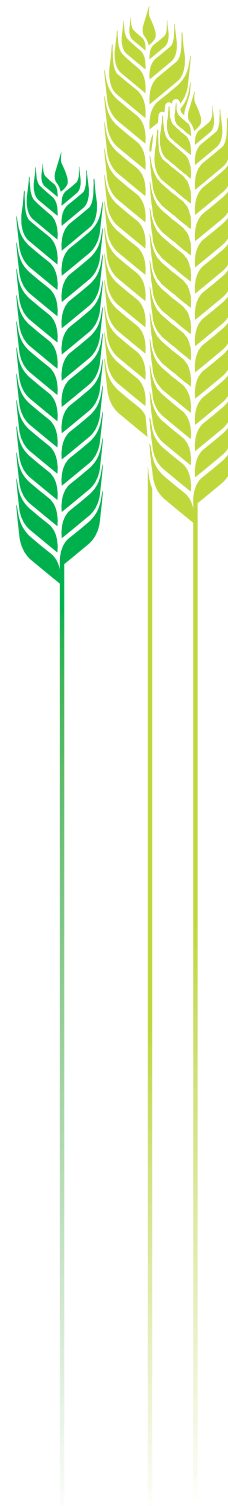
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penulisan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan koordinasi lintas lembaga dan jenjang pemerintahan.

Langkah operasional seyogyanya dilakukan melalui pendekatan dan metode mulai dari identifikasi dokumen yang telah disusun, perumusan masalah dalam penyusunan rencana, advokasi dan sosialisasi PPRG, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang melibatkan kelompok sasaran.

A. IDENTIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN YANG TELAH DISUSUN

Kesenjangan gender di bidang pertanian dapat dilihat dengan mengidentifikasi dokumen perencanaan dan pedoman pelaksanaan yang sudah tersusun apakah sudah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Dokumen perencanaan mencakup dokumen perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan anggaran, perencanaan monitoring dan evaluasi. Dokumen pelaksanaan mencakup pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun peraturan perundang-undangan lainnya .

Proses identifikasi dilakukan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan menggunakan kerangka analisis gender. Pemangku kepentingan tersebut adalah: (1) aparat birokrasi, terutama



SKPD lingkup pertanian, (2) aparat pembina teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat penerima manfaat, (3) kelembagaan kelompok penerima manfaat dan (4) rumah tangga petani penerima manfaat.

B. PERUMUSAN MASALAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA

Salah satu alat yang digunakan untuk menemukan permasalahan sekaligus mencari solusi pemecahan masalah dalam penyusunan perencanaan adalah metode Sistem Manajemen Kegiatan Berbasis Kinerja (Project Performance Management System/PPMS). Di dalam PPMS terdapat tahapan manajemen perencanaan yang dikenal dengan kerangka kerja logis (*logical frame work*) mulai dari identifikasi masalah, menentukan akar permasalahan, menentukan indikator keberhasilan mulai dari input, output, outcome sampai dampak, cara pengukuran indikator serta sumber data dan asumsi yang digunakan. Setiap indikator harus terukur, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan tingkat tercapainya sasaran dari target yang telah ditentukan berdasarkan anggaran atau sumber daya yang tersedia. Melalui kerangka kerja logis, para penentu kebijakan dan perencana dapat melihat gambaran secara ringkas apakah tahapan proses suatu kegiatan/sub kegiatan sudah berorientasi pada keadilan dan kesetaraan gender mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi.

C. ADVOKASI DAN SOSIALISASI

Upaya penyampaian Informasi mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Gender Budget Statement (GBS) dilaksanakan melalui advokasi dan sosialisasi.

Advokasi PPRG dan GBS tersebut merupakan tindakan untuk mempengaruhi dan menggalang dukungan dari pemangku kepentingan, diantaranya dalam bentuk aksi-aksi yang dirancang untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan di bidang legislasi, penegakan hukum, dan para perencana dan komponen penganggaran regulasi pelaksanaan. Dalam melaksanakan advokasi diperlukan jejaring yang terorganisir dengan baik, oleh karena itu diperlukan berbagai metode penyampaian informasi. Kegiatan advokasi yang ditujukan tidak hanya kepada birokrat, akan tetapi ditujukan juga kepada para akademisi, penggiat asosiasi profesi, pelaku usaha, penggerak swadaya masyarakat, jurnalis serta unsur masyarakat lainnya.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang melakukan advokasi agar hasilnya efektif harus dapat dilakukan secara berkesinambungan, sehingga dapat mengakomodasi

kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan advokasi terhadap kebijakan yang sensitif gender dalam pelaksanaan program menjadi sangat penting, untuk itu perlu dipastikan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Apakah kebijakan di sektor pertanian dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sudah responsif gender?
- (ii) Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman dan sensitifitas gender seperti dalam bentuk pelatihan teknis analisis gender ?
- (iii) Apakah sudah ada program aksi untuk memfasilitasi dan memediasi kegiatan/sub kegiatan pengintegrasian gender di lapangan ?

Sosialisasi adalah penyampaian informasi tentang program aksi kegiatan pengintegrasian gender di lapangan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat penerima manfaat. Media sosialisasi dapat dilakukan melalui forum koordinasi di berbagai jenjang pemerintahan, penerbitan pedoman, iklan layanan masyarakat atau publikasi lainnya.

D. PELAKSANAAN

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender pada akhirnya ditentukan pada proses seleksi calon lokasi dan calon penerima manfaat. Salah satu metoda yang cukup efektif untuk memberikan ruang keterlibatan segenap pelaku dan penerima manfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah Kajian Cepat Partisipatif (*Participatory Rapid Appraisal/PRA*). Metoda ini merupakan cara yang cukup teruji dalam memahami permasalahan (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat) di lapangan dengan melibatkan masyarakat penerima manfaat. Proses fasilitasi PRA memerlukan bantuan “orang luar” sebagai fasilitator diantaranya lembaga penggerak swadaya masyarakat serta kelompok masyarakat sekitar yang berperan aktif dalam membantu melaksanakan dan melakukan pengawasan.

E. MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan dan penganggaran di bidang pertanian yang dananya bersumber dari APBN, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan tidak hanya mengikat Satuan Kerja (Satker) Lingkup Departemen Pertanian, akan tetapi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan).

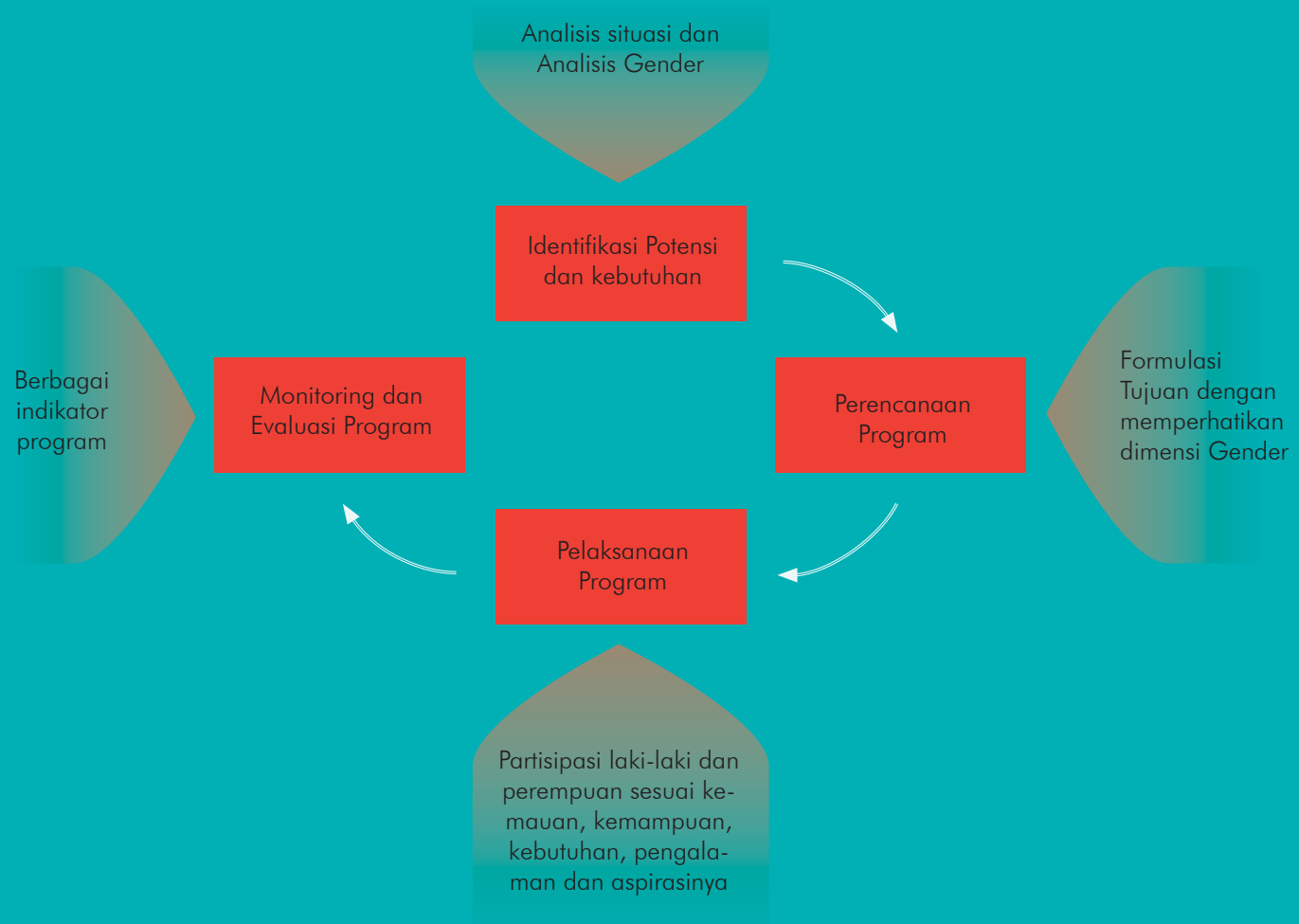
Pemantauan didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Ruang lingkup yang dipantau meliputi: (1) program/kegiatan/sub-kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja (Renja) Departemen Pertanian yang mendapatkan anggaran (DIPA), (2) program/kegiatan/sub-kegiatan di tingkat Provinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, dan atau Tugas Pembantuan dan (3) program/kegiatan/sub-kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan.

Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di bidang pertanian dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi akan digunakan oleh Pimpinan Departemen Pertanian untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian pencapaian indikator dan sasaran hasil (outcome). Prinsip dari Evaluasi adalah: terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi para pelaksana harus sudah memahami isu gender serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat secara tepat menemukan adanya kesenjangan gender.

Bagan 2:

Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Bidang Pertanian



F. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peluang yang dimiliki penerima manfaat untuk bekerja dan terlibat dalam usaha pertanian, seperti : (1) jumlah penerima manfaat menurut jenis kelamin yang ikut menjadi penanggung jawab atau pelaksana dalam program pembangunan disektor pertanian, (2) aktivitas usaha menurut jenis kelamin sudah tercatat dalam data profil desa sebagai bagian dari potensi atau SDM desa yang berkaitan dengan jenis usaha pertanian.
2. Akses yang terbuka bagi semua penerima manfaat terhadap sumber daya (teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja), seperti : (1) wadah informasi yang mudah dan dapat diakses oleh penerima manfaat (laki-laki/perempuan) secara adil berkaitan dengan jenis usaha pertanian, (2) kebijakan atau peraturan yang memudahkan penerima manfaat (laki-laki/perempuan) untuk memperoleh modal usaha dalam usaha pertanian
3. Besarnya manfaat yang dinikmati oleh penerima manfaat dalam pembangunan/program/kegiatan/sub-kegiatan, seperti: (1) adanya perubahan status perempuan dan laki-laki dari kondisi marginal menjadi kelompok yang diperhitungkan dalam segala aspek usaha pertanian, (2) besarnya partisipasi perempuan diberbagai bidang dalam pembangunan pertanian, (3) perubahan pembagian peran terhadap sumber daya baik dalam lingkup keluarga, komunitas dan masyarakat dalam mengakses, berpartisipasi pengambilan keputusan dan manfaat dari setiap usaha pertanian
4. Tidak adanya kebijakan yang diskriminatif dalam usaha pertanian. Ukurannya :
 - a) Berkurangnya pertengkaran atau perselisihan di masyarakat khususnya laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh ketidakadilan khususnya dalam semua jenis usaha pertanian
 - b) Berkurangnya kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, antara kaya dan miskin atau kelas-kelas lainnya di masyarakat yang terkait dengan usaha pertanian.
5. Ada data terpilah (data Gender di semua bidang pembangunan pertanian). Ukurannya:
 - a) Ada daftar data yang terpilah menurut jenis kelamin baik kuantitatif atau kualitatif tentang aktivitas baik ekonomi, sosial dan politik berdasarkan jenis kelamin;

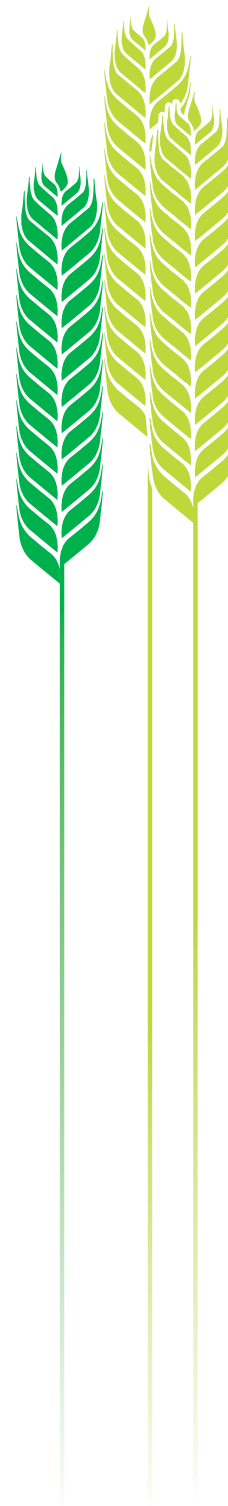
- b) Ada daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin pada semua jenis usaha pertanian;
 - c) Ada daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin pada semua jenis usaha pertanian;
 - d) Ada peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin meliputi semua jenis usaha pertanian.
6. Tersedianya kebutuhan praktis gender (kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran sosial yang diperankan untuk merespon kebutuhan jangka pendek), perbaikan taraf hidup dan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penggarapan usaha pertanian. Ukurannya :
- a) Tersedianya fasilitas yang mudah diakses dan sesuai standar kesehatan bagi perempuan, dan laki-laki serta keluarga sehubungan dengan usaha pertanian;
 - b) Berkurangnya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan, dan laki-laki serta keluarga yang diakibatkan proses dalam usaha pertanian.
7. Terbentuk dan berfungsinya Gender Focal Point, kelompok kerja (Pokja) PUG di bidang pertanian baik di nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ukurannya:
- a) Adanya pertemuan atau diskusi reguler tentang penetapan isu gender dan upaya penyelesaiannya baik ditingkat pengambil keputusan maupun pelaksana lapangan;
 - b) Adanya refleksi atau evaluasi secara berkala untuk melihat sejauhmana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam suatu kegiatan/sub-kegiatan atau pembangunan;

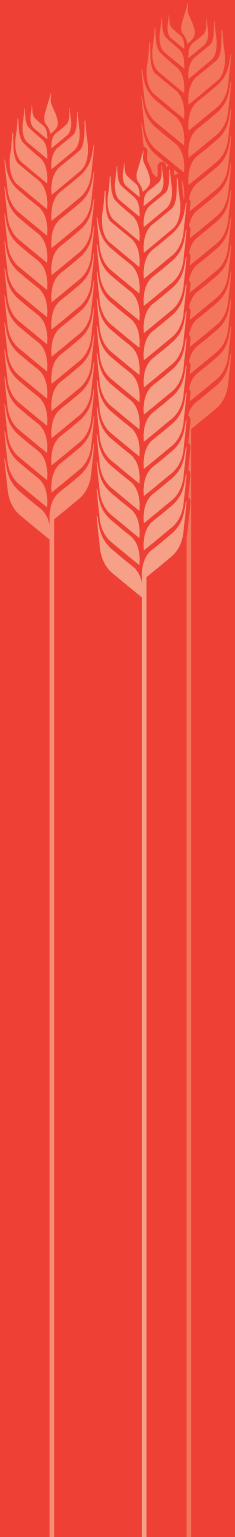
Bab IV.

Penutup

Perencanaan yang responsif gender, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan memasukan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Dalam rangka menyelenggarakan perencanaan yang responsif gender perlu dilakukan analisis gender pada semua kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan. Anggaran yang responsif gender, yaitu untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan. Dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu partisipasi perempuan dan laki-laki secara aktif dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, persepsi bagi para penyusun perencanaan dan anggaran tentang “makna” gender serta arti pentingnya perencanaan dan penganggaran dan mutlak diperlukan.

Mengingat bahwa kesinambungan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) ARG sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya data terpilah berdasar jenis kelamin, untuk itu perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang.



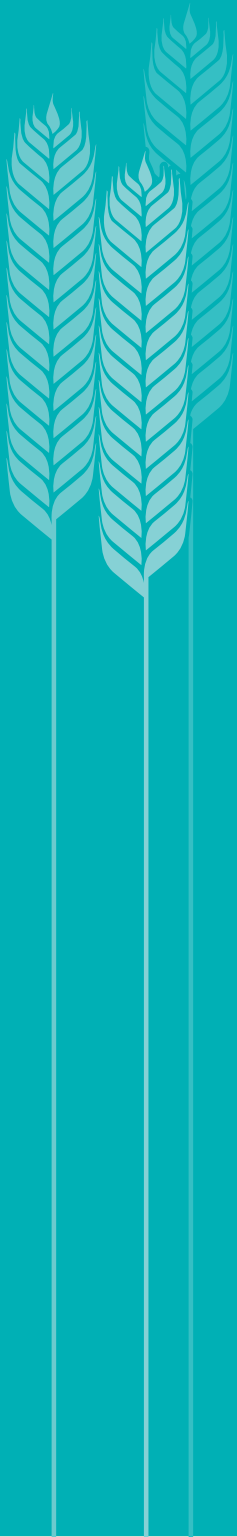


DAFTAR PUSTAKA

1. Asian Development Bank. Tanpa tahun. Daftar Periksa (Checklist) Gender.
2. Moser, Caroline O.N. 1993. Gender Planning And Development: Theory, Practice, and Training. London: Routledge.
3. Fong, Monica, dan Anjana Bhushan. 1996. Toolkit on Gender In Agriculture. Gender - Toolkit Series no.1. Washington, D.C.: World Bank.
4. Debbie budlender, Community Agency For Social Enquiry Cape Town South Africa Expectations versus Realities In Gender Responsive Budget Initiatives, 2005 debbieb@sn.apc.org
5. Khairani Arifin - Sekretaris Jenderal RPUK buku Panduan Pengintegrasian Keadilan Gender dalam Program Pertanian, Irigasi Dan Perikanan, oleh Tim Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) atas dukungan Black and Veatch (BV), Banda Aceh, akhir Agustus 2007
6. Rini S Soemarno. Kumpulan materi workshop “Peningkatan Kapasitas Pemda – LSM – PSW Dalam Melaksanakan Anggaran Responsif Gender” di Yogyakarta 30 juli – 1 agustus 2009
7. Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pembangunan Pertanian Tahun 2009. Sekretariat jenderal departemen pernyanian. Januari 2009.
8. Anggaran Responsif Gender – Konsep dan Aplikasi Kerjasama CIBA – TAF – CIDA, Jakarta, Mei 2007
9. Making the MDG’S work for all. Gender Responsive Right Based Approaches to the MDG’s. UNIFEM – Written by Lorraine Corner.

lampiran 1

FORMAT GBS DAN CARA PENYUSUNANNYA



Lampiran 1.a.:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 / PMK.02 / 2009 Tanggal 7 Juli 2009 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Tabel Bab III.1. Format GBS dan Cara Penyusunannya

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :

Unit Organisasi :

Program		Nama program yang ada pada K/L
Kegiatan		Nama Kegiatan sebagai penjabaran program
Sub-kegiatan		Nama sub-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan dan/atau bagian/tahapan kegiatan
Analisis Situasi <i>(diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak hanya berupa gambaran bahwa subkegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran)</i>		Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh subkegiatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari persoalan tersebut.
Perencanaan Kegiatan <i>(Dipilih hanya pada Grup Akun yang secara langsung mengubah kondisi kesenjangan gender)</i>	Grup Akun 1	Berisikan bagian/tahapan kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi.
	Indikator input	Minimal berisikan 1 indikator input bagi bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi

	Indikator Output	Minimal berisikan 1 indikator output bagi bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi
	Grup Akun 2	Berisikan bagian/tahapan kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi.
	Indikator Input	Minimal berisikan 1 indikator input bagi bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi
	Indikator Output	Minimal berisikan 1 indikator output bagi bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi
	Dst...	
Anggaran Kegiatan dan Sub- kegiatan		Jumlah anggaran yang dialokasikan pada kegiatan/sub-kegiatan secara menyeluruh, maupun jumlah yang dialokasikan untuk bagian/tahapan kegiatan spesifik yang terkait aspek gender (bila ada informasinya)
Indikator Outcome atau dampak/hasil secara luas (dapat juga sebagai kontribusi pencapaian outcome pada tingkat kegiatan atau program)		2-3 indikator yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi

Lampiran 1.b.:

PSLP04-DSLP

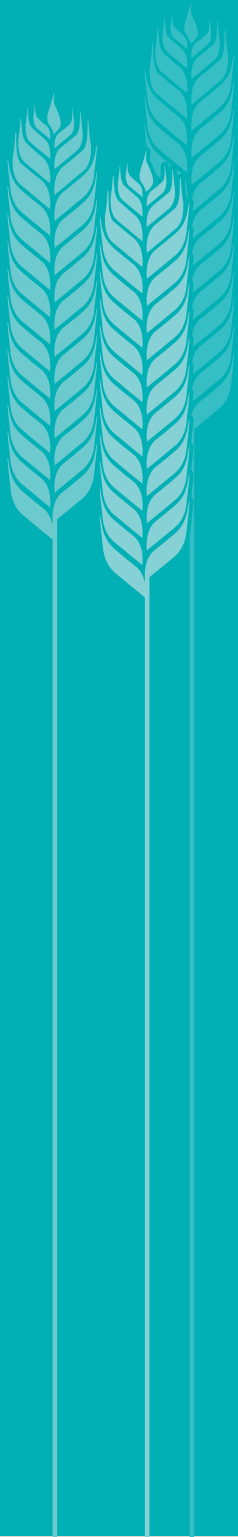
DAFTAR PETANI SAMPEL

Subround/Tahun Survei :

I. PENGENALAN TEMPAT						
1	Propinsi	:			
2	Kabupaten	:			
3	Kecamatan	:			
4	Desa/Kelurahan	:			
5	Nomor Blok Sensus	:				
6	Nomor Kode Sampel	:				
II. KETERANGAN PETANI SAMPEL						
Nomor Sampel	Nomor Urut				Strata Ruta 1 - Irigasi 2 - Non Irigasi	Nama Kepala Rumah Tangga
	Segmen	Bangunan Fisik	Bangunan Sensus	Rumah Tangga		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sampel 1						
Sampel 2						
Sampel 3						
Sampel 4						
Sampel 5						
Sampel 6						
Sampel 7						

lampiran 2

ANALISIS GENDER DI BIDANG PERTANIAN



I. Profil Kegiatan di Bidang Pertanian

Dalam kerangka perencanaan, salah satu alat analisis gender bidang pertanian yang dapat digunakan adalah metode *Gender Analysis Pathway* (GAP). Metode ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dilihat dari aspek akses, peran, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan terhadap kegiatan pembangunan pertanian. Pokok bahasan yang dianalisis meliputi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Melalui metode GAP diharapkan dapat ditetapkan kegiatan pembangunan pertanian yang lebih efektif dan efisien.

Secara umum ketimpangan gender dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian lebih banyak terjadi kepada perempuan. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa penerima manfaat kegiatan adalah kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama, yang umumnya didominasi oleh laki-laki. Cara pandang yang demikian cenderung mengabaikan peranan, kebutuhan, aspirasi, permasalahan dan pengalaman perempuan dalam tahapan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Untuk mengubah cara pandang ini diperlukan usaha keras dan berkesinambungan melalui cara persuasif agar dalam pelaksanaan kegiatan perempuan dapat terlibat mulai dalam tahapan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan. Contoh untuk mengubah cara pandang yang tidak sensitif gender agar menjadi sensitif gender dapat dilihat pada matriks berikut:

Contoh cara pandang yang tidak sensitif gender	Mengubah cara pandang agar sensitif gender
<ul style="list-style-type: none">» Bidang pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan irigasi lebih banyak menggunakan tenaga fisik sehingga tidak sesuai dilakukan oleh perempuan.» Pekerjaan yang berhubungan dengan ketiga sektor tersebut selalu dilakukan di luar rumah, sedangkan tugas perempuan berada di wilayah domestik (mengurus keluarga) sehingga menjadi suatu keanehan jika perempuan diberi tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tersebut.	<ul style="list-style-type: none">» Pelaksana program harus men-sosialisasikan pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki.» Membangun hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di desa dan memin-ta mereka untuk juga mensosialisasi-kan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam tahapan program/kegiatan pertanian.

- » Perempuan tidak harus melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan desa, karena mereka juga akan mendapat manfaat secara tidak langsung dari suami-suaminya.
- » Anggapan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan bisa diwakili oleh laki-laki.
- » Pengetahuan agama masyarakat, yang menganggap perempuan tidak seharusnya melakukan pekerjaan berat atau bekerja di malam hari, padahal menjaga pintu air dan bertambak adalah pekerjaan yang tetap harus dilakukan di malam hari.
- » Kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan pembangunan desa lebih pantas dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perempuan juga merasa tidak nyaman jika harus melakukan pekerjaan berat terutama yang berhubungan dengan perikanan dan irigasi.
- » Pendekatan selanjutnya ditujukan untuk kelompok perempuan, hal ini penting dilakukan agar mereka bersedia terlibat dalam tahapan program/kegiatan pertanian
- » Penguatan pemahaman mengenai hak-hak perempuan juga penting dilakukan, bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi desa baik formal maupun informal.
- » Akan lebih baik lagi jika kepala desa bersedia mengeluarkan surat resmi untuk meminta perempuan agar bersedia terlibat dalam tahapan program/kegiatan pertanian. Dengan cara ini perempuan akan merasa lebih nyaman untuk ikut serta.

A. DATA PEMBUKA WAWASAN

Data diperlukan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan manusia yang berbasis kesetaraan gender. Untuk menjadi sensitif gender, informasi tentang pelaku dan penerima manfaat harus didukung dengan data yang terpilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, kondisi kerentanan (anak-anak, lansia, ibu hamil dan menyusui dan cacat fisik).

Jenis data terpilah menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang perlu dikumpulkan antara lain adalah:

- » Data sosial ekonomi dan ketenagakerjaan: penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, penduduk yang bekerja serta pekerja sektor formal dan informal.
- » Data politik dan pemerintahan: pejabat yang menduduki jabatan menurut eselonisasi (struktural) dan jabatan fungsional.

Data terpilah bidang pertanian yang perlu menjadi kebutuhan sebagai bahan analisis situasi dan mengukur keberhasilan pengintegrasian dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah mencakup: pekerja yang memanfaatkan teknologi pertanian menurut sub sektor, kelompok tani, kepala rumah tangga (laki-laki dan perempuan), tenaga kerja pertanian, tingkat pendidikan, jumlah jam kerja seminggu,

upah dan status penguasaan lahan (pemilik, penggarap, penyewa, penyakap), penangkar, pedagang benih/bibit, petugas lapangan pertanian (penyuluh pertanian, manteri tani, dan POPT-PHP) serta semua pelaku yang terkait dengan pembangunan pertanian

Data yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang pembangunan yang sensitif gender harus selalu *up to date*, karena manfaat yang diterima masyarakat selalu berubah cepat. Dengan demikian pada saat updating harus senantiasa dilakukan pendataan secara konsisten dengan memperhatikan data terpilah menurut jenis kelamin.

Contoh:

Pada kuesioner PSLP04-L (terlampir) tentang Pilot Survey Padi Sawah – Daftar Petani Padi Sawah pada Blok Sensus Sampel, dalam matriks yang harus diisi para Pencacah, dicantumkan pada kolom 5 yang diisi : “Nama Kepala Rumah Tangga”, namun tidak disebutkan keterangan yang menggambarkan bahwa “Kepala Rumah Tangga” bisa laki-laki maupun Perempuan Kepala Rumah Tangga, padahal dalam PPRG diperlukan analisis situasi yang menggambarkan adanya keadilan dan kesetaraan gender.

Manfaat dan Sumber Data

Data terpilah sangat dibutuhkan untuk :

- » Proses penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai pada tingkat terendah (Desa/Kelurahan). Proses penyusunan PPRG, manfaat data antara lain :
 - a) Dasar penyusunan perencanaan kegiatan, agar perencanaan yang disusun memenuhi kaidah responsif gender,
 - b) Alat pengendalian, agar kegiatan yang telah responsif gender dapat dilaksanakan secara dini, sehingga penyimpangan yang terjadi pada saat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi dapat terkontrol sebagai bahan koreksi kegiatan yang responsif gender.
 - c) Dasar evaluasi, agar kinerja kegiatan yang responsif gender dapat terukur berdasarkan hasil atau manfaat yang dicapai.
- » Sumber data terpilah tersebut dikumpulkan dari primer (survei lapangan) dan data sekunder seperti Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

B. PROFIL KONDISI KEGIATAN DAN PERAN PELAKU DI BIDANG PERTANIAN

Gambaran profil kegiatan pembangunan pertanian yang responsif gender secara garis besar dapat dibagi menjadi aspek SDM dan aspek kelembagaan.

1. Aspek Sumberdaya Manusia

a. Non-ekonomi :

Dalam menguraikan kegiatan dari aspek SDM, perlu dipertimbangkan bahwa secara tradisional, khususnya di perdesaan, terdapat kegiatan yang bersifat non-ekonomi seperti pemeliharaan sumber daya manusia yang dilaksanakan untuk menghasilkan dan memelihara rumah tangga dan masyarakat, pengumpulan bahan bakar dan air, persiapan penyediaan makanan, perawatan anak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemeliharaan rumah. Kegiatan ini pada umumnya tidak digaji dan tidak diperhitungkan dalam pendapatan nasional.

- » Siapa yang melakukan tugas-tugas non-ekonomi dan merawat anggota rumah tangga? Di antara tugas-tugas tersebut adalah perawatan anak, perawatan orang berusia lanjut, produksi makanan (termasuk pengolahan tanaman makanan dan hewan ternak peliharaan, belanja, persiapan makanan dan memasak), pengumpulan bahan bakar dan air, pendidikan, perawatan kesehatan, cuci dan pembersihan, pemeliharaan rumah (struktural), produksi kesenian dan kerajinan, dan kinerja kewajiban-kewajiban sosial.
- » Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut

b. Ekonomi :

Disamping kegiatan non-ekonomi, terdapat kegiatan yang mendatangkan keuntungan atau bernilai ekonomi, yang dibedakan menjadi aspek budidaya dan aspek pengolahan dan pemasaran.

b.1. Aspek Budidaya (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan)

Kegiatan-kegiatan produksi atau ekonomi, yang dibedakan dari kegiatan-kegiatan non-ekonomi atau kegiatan-kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia, terdiri atas seluruh tugas yang memberikan sifat ekonomis untuk rumah tangga dan masyarakat, yakni: produksi tanaman dan hewan ternak dan pekerjaan yang diberi upah.

- » Apakah kaum perempuan aktif dalam kegiatan produksi subsistensi dan kegiatan untuk mencari uang?
- » Apa saja beban kerja kelompok sasaran pada seluruh tahapan proses pertanian? Pada musim-musim apa tugas-tugas tersebut dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan secara terpisah pada setiap komponen produksi (memilih bibit atau pemotongan, persiapan lahan, penanaman atau pembibitan, penyiangan, dan sebagainya) baik untuk tanaman yang digunakan untuk mencari uang maupun untuk dimakan, untuk produksi hewan ternak (termasuk perunggasan, perusahaan susu dan hasil olahannya, perikanan, produksi), serta untuk tanaman perkebunan.
- » Apakah tugas-tugas yang ada dibagi untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, atau dilaksanakan oleh satu jenis gender saja?
- » Apakah secara budaya laki-laki atau perempuan tidak bisa dilibatkan dalam tugas-tugas tertentu yang kemungkinan akan terkena dampak dari program/kegiatan yang diusulkan?
- » Apakah laki-laki atau perempuan sampai tingkat tertentu (perhatikan pada tingkatan mana) saling mengambil alih pekerjaan pada masa-masa sulit dan tekanan pekerjaan atau karena kegiatan tertentu lebih menguntungkan?
- » Seberapa jauh perubahan komposisi dalam rumah tangga (misalnya karena rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan perlu secara khusus dikaji) dalam hal ini, migrasi tenaga kerja mengubah pembagian kerja berdasarkan gender?
- » Apakah program/kegiatan ini akan meningkatkan penggunaan waktu oleh kaum perempuan atau laki-laki dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian?

b.2. Aspek Pengolahan dan Pemasaran

Kegiatan-kegiatan produksi atau ekonomi, yang dibedakan dari kegiatan-kegiatan non-ekonomi atau kegiatan-kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia, terdiri atas seluruh tugas yang memberikan sifat ekonomis untuk rumah tangga dan masyarakat, yakni: produksi kerajinan tangan, pemasaran, dan pekerjaan yang diberi upah.

- » Apakah kaum perempuan aktif dalam kegiatan produksi pasca panen dan kegiatan untuk mencari uang?
- » Apa saja beban kerja kelompok sasaran pada seluruh tahapan proses pasca-panen pertanian? Pada musim-musim apa tugas-tugas tersebut dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan secara terpisah pada setiap komponen pasca panen

(pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pemrosesan atau transformasi makanan, pemasaran, dan sebagainya) baik untuk tanaman yang digunakan untuk mencari uang maupun untuk dimakan, untuk produksi hewan ternak (termasuk perunggasan, perusahaan susu dan hasil olahannya, produksi dan pemrosesan madu), serta untuk tanaman perkebunan.

- » Apakah tugas-tugas yang ada dibagi untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, atau dilaksanakan oleh satu jenis gender saja?
- » Apakah secara budaya laki-laki atau perempuan tidak bisa dilibatkan dalam tugas-tugas tertentu yang kemungkinan akan terkena dampak dari program/kegiatan yang diusulkan?
- » Apakah laki-laki atau perempuan sampai tingkat tertentu (perhatikan pada tingkatan mana) saling mengambil alih pekerjaan pada masa-masa sulit dan tekanan pekerjaan atau karena kegiatan tertentu lebih menguntungkan?
- » Seberapa jauh perubahan komposisi dalam rumah tangga (misalnya karena rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan perlu secara khusus dikaji dalam hal ini, migrasi tenaga kerja mengubah pembagian kerja berdasarkan gender)?
- » Apakah program/kegiatan ini akan meningkatkan penggunaan waktu oleh kaum perempuan atau laki-laki dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian?
- » Apakah teknologi baru akan diperkenalkan untuk membantu peran kaum perempuan dalam pertanian?

2. Aspek Kelembagaan

- » Apakah jenis organisasi komunitas (organisasi sosial budaya tradisional, kelompok-kelompok produksi seperti kelompok-kelompok koperasi, kelompok simpan pinjam, organisasi-organisasi berbasis komunitas yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah) yang ada dalam wilayah program/kegiatan?
- » Bagaimana profil keanggotaan organisasi-organisasi komunitas tersebut, apakah tujuan dan strategi mereka, dan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut?
- » Siapa yang mengatur dan melaksanakan pekerjaan untuk komunitas lokal (misalnya, perawatan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas sosial seperti perlengkapan penyediaan air, tempat-tempat pertemuan, dan tempat-tempat ibadah)?

- » Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
- » tersebut dan kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan?

C. PROFIL PELUANG PENGUSAHAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PERTANIAN

Gambaran akses dan pengendalian sektor pertanian didasarkan pada sumber daya produksi seperti: lahan, air, peralatan dan mesin pertanian, tenaga kerja, modal, teknologi, dan SDM.

Berdasarkan hal tersebut, perencana dapat mempertimbangkan apakah kegiatan yang diusulkan dapat merusak akses pada sumber daya produksi, atau mengubah keseimbangan pengaruh antara laki-laki dan perempuan dalam pengendalian sumber daya. Berbagai informasi dalam gambaran akses dan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran Kotak IV-3.

Pada gambaran akses dan pengendalian harus diterangkan seberapa jauh laki-laki dan perempuan memiliki akses pada lahan, air, modal, peralatan serta faktor-faktor produksi pertanian lainnya. Gambaran ini menguji sejauh mana kaum perempuan akan terhambat untuk berpartisipasi secara setara dalam kegiatan pertanian. Sebagai contoh, apabila perempuan memiliki akses yang terbatas pada pendapatan atau lahan, mereka mungkin tidak bisa bergabung dengan koperasi pertanian, yang menyediakan input produksi dan kesempatan komersial, atau menjadi produsen komersial yang mandiri. Dalam beberapa sub-kelompok, laki-laki juga akan mengalami hal yang sama.

Mekanisme pengelolaan kegiatan (pembentukan kelompok pengguna air atau koperasi petani) akan menentukan siapa yang memiliki akses dan pengendalian atas sumber daya produksi serta akan mengubah hubungan gender yang ada.

Profil akses dan pengendalian dapat diuji dengan daftar pertanyaan berikut :

1. Sampai sejauh mana perempuan dan laki-laki mendapatkan atau memiliki akses terhadap:

- » Lahan dan air.
- » Modal (kredit, tabungan tunai atau semacamnya)
- » Teknologi pertanian.
- » Peralatan dan mesin pertanian.

Kiat - 1

Seberapa jauh laki-laki dan perempuan memiliki atau mempunyai akses pada lahan, air, modal, peralatan dan mesin pertanian serta faktor-faktor produksi pertanian lainnya?

- » Tenaga kerja (anak-anak, suami-istri, sanak keluarga lainnya, kelompok kerja informal, tenaga kerja yang disewa) dan pengaturan tenaga kerja.
- » Input pertanian (pupuk, bibit, obat-obatan).
- » Transportasi.
- » Pelatihan ketrampilan.
- » Fasilitas-fasilitas pasca panen dan pengolahan hasil.
- » Pemasaran melalui keanggotaan Koperasi atau kelompok yang dibentuk pemerintah atau non-pemerintah sejenis (sebagai anggota penuh atas nama mereka sendiri, berikut hak suara).
- » Jaringan informasi serta media komunikasi.

2. Manfaat

- 1) Sejauhmana manfaat material dan non-material yang diperoleh perempuan dan laki-laki dari kegiatan pertanian:

Upah

- Pendapatan dari penjualan barang produk pertanian (primer dan olahan);
 - Pendapatan dari penjualan jasa;
 - Produk samping;
 - Kemitraan formal dan non formal;
 - Status, kehormatan.
- 2) Seberapa jauh perempuan dan laki-laki memberikan manfaat tersebut kepada keluarga mereka?
 - 3) Pola-pola pengeluaran seperti apa yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki?

Kiat - 2

Apakah kegiatan akan memperkenalkan teknologi baru untuk membantu peran perempuan dalam pertanian?

II. Analisis Situasi Kegiatan di Bidang Pertanian

A. ANALISIS FAKTOR STRUKTURAL DAN SOSIAL BUDAYA SEKTOR PERTANIAN

Faktor-faktor struktural dan sosial budaya yang mempengaruhi pola relasi gender, akses, dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor demografis, termasuk komposisi rumah tangga dan kepala rumah tangga;
 - » Kondisi ekonomi secara umum, seperti tingkat kemiskinan, rata-rata inflasi, distribusi pendapatan, perdagangan internal, dan infrastruktur;
 - » Faktor-faktor agama dan budaya; tingkat pendidikan dan rata-rata partisipasi gender; dan
 - » Faktor-faktor hukum, kelembagaan, dan politik.

Dalam menganalisis faktor-faktor tersebut diatas harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini:

1. Kegiatan yang ditujukan untuk memastikan agar partisipasi perempuan bisa mempengaruhi kebijakan pertanian, yang berasal dari berbagai institusi:
 - Departemen Pertanian;
 - Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Institusi pemerintah lainnya yang menangani pertanian;
 - Lembaga penelitian pemerintah atau non pemerintah yang terkait dengan pertanian;
 - LSM bidang pertanian;
 - Lembaga pelatihan yang menyediakan pelatihan ketrampilan pertanian; dan

Kiat - 3

Hubungi organisasi non-pemerintah perempuan untuk memobilisasi kaum perempuan

Kiat - 4

Norma budaya mana yang menghambat Partisipasi perempuan Dan laki-laki dalam ke-giatan?

- Media yang mengkhususkan bidang pertanian.
- » Kepercayaan dan norma masyarakat yang bisa mempengaruhi partisipasi kaum perempuan dan laki-laki dalam aktivitas kegiatan mencakup hal-hal berikut ini:
 - Faktor budaya yang dapat mempengaruhi terjadinya isu kesenjangan gender, misalnya tidak menyertakan perempuan dalam kegiatan yang produktif dalam usaha pertanian;
 - Partisipasi penuh dalam kegiatan reproduksi semua jenis usaha pertanian;
 - Tidak diikutkannya kaum perempuan dalam partisipasi aktif di dalam kegiatan publik dalam usaha pertanian;
 - Tidak diperkenalkannya kaum perempuan berhubungan dengan staf pelayanan laki-laki yang terkait dengan usaha pertanian; atau
 - Kurangnya mobilitas dikarenakan norma-norma budaya yang menghambat akses, partisipasi, kontrol kaum perempuan dalam sumberdaya dan untuk kaum perempuan mendapatkan manfaat dalam pembangunan pertanian.
- » Hukum atau peraturan yang dapat mempengaruhi akses, partisipasi, dan kontrol kaum perempuan dan laki-laki agar mendapat manfaat:
 - Hukum waris khususnya yang terkait dengan bidang pertanian
 - Peraturan kepemilikan tanah pertanian;
 - Peraturan kredit (seperti penandatanganan oleh wali laki-laki atau manfaat berdasarkan kepemilikan tanah atau keduanya dalam semua usaha pertanian
 - Hukum tenaga kerja (mungkin relevan untuk lahan pertanian, agro-industri); atau
 - Ketentuan budaya yang dihubungkan dengan usaha pertanian.

B. ANALISIS SIKLUS DAN ISU KEGIATAN DI BIDANG PERTANIAN

Analisis siklus dan desain kegiatan yang mengindikasikan kemungkinan dirugikannya salah satu gender, dapat diuji dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Produksi

- » Apakah alih teknologi dapat menyebabkan termarginalkannya kaum perempuan atau laki-laki?

- » Apakah perubahan/pengembangan varietas tanaman akan mempengaruhi kesempatan kerja kaum perempuan atau laki-laki?
- » Apakah hasil atau kegiatan yang dirancang akan meningkatkan beban kerja kaum perempuan atau laki-laki?
- » Manfaat apa yang akan diterima kaum perempuan atau laki-laki dari kegiatan usaha pertanian tersebut?

2. Pelatihan

- » Pelatihan apa yang dapat mempengaruhi peran, akses, partisipasi, kontrol kaum perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan kesetaraan gender?
- » Apakah pelatihan tersebut dapat meningkatkan pendapatan sehingga akan mengubah perilaku/gaya hidup?
- » Pelatihan apa yang dapat membantu kaum perempuan dan laki-laki agar bisa mendapatkan manfaat dari perubahan pengelolaan usaha tani?
- » Apakah potensi kaum perempuan dan laki-laki telah dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga pendukung pertanian seperti lembaga pendidikan, pembangunan sosial, dan kesehatan?
- » Haruskah kaum perempuan dilatih secara terpisah dari kaum laki-laki untuk memastikan bahwa mereka menerima dan mengambil manfaat dari semua pelatihan yang terkait dengan usaha tani pertanian?
- » Apakah pelatihan dapat diatur jadwal pelaksanaannya sehingga waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki kaum perempuan karena tanggung jawab di rumah tangga?
- » Pelatihan apa yang disediakan bagi kaum perempuan untuk mengungkapkan kebutuhan strategis gender mereka dan meningkatkan pengaruh mereka, serta mengawasi pengambilan keputusan (misalnya, pelatihan pengolahan hasil pertanian)?
- » Apakah percontohan (demplo) setempat bisa membantu kaum perempuan dan laki-laki memahami dan mendapatkan akses terhadap pengambilan keputusan tentang sumberdaya?
- » Apakah pelatihan membutuhkan strategi komunikasi dan metode pengajaran yang inovatif bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan yang buta huruf?
- » Dapatkah unsur manajemen usaha kecil, ketrampilan wiraswasta dan akuntansi, serta pemasaran, dimasukkan dalam kurikulum pelatihan sehingga dapat mendatangkan pendapatan bagi kaum perempuan dan laki-laki di perkotaan?

Kiat - 5

Masukkan pelatihan kepekaan-gender untuk para petani

Kiat - 6

Bagaimana kegiatan tersebut menjadikan hak atas informasi diperoleh secara lebih adil bagi perempuan dan laki-laki?

3. Informasi

- » Apakah informasi dan pelayanan tambahan menjangkau kaum perempuan maupun laki-laki?
- » Apakah informasi kegiatan disediakan secara langsung baik kepada kaum perempuan maupun kaum laki-laki?
- » Apakah strategi komunikasi yang terpisah diperlukan untuk memastikan bahwa pesan kegiatan menjangkau kaum perempuan maupun laki-laki?
- » Apakah pesan kegiatan layak secara budaya dan didesain untuk mempromosikan kesamaan gender?

4. Partisipasi bagi kelompok gender yang termarginalkan :

- » Apakah kelompok tersebut dimintai pendapatnya dan ikut ambil bagian dalam penetapan tujuan kegiatan?
- » Apakah kelompok tersebut dilibatkan dalam perencanaan dan desain kegiatan?
- » Jika kelompok tersebut tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan lokal sehubungan dengan usaha pertanian, dapatkah mereka dilibatkan melalui kegiatan advokasi dalam kegiatan tersebut ?
- » Dapatkah organisasi non-pemerintah perempuan dikontrak untuk memobilisasi kelompok tersebut agar berpartisipasi dalam kegiatan semua usaha pertanian tersebut?
- » Jika masalah mobilitas menghambat partisipasi kelompok gender tertentu, dapatkah kegiatan tersebut dikelola untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan gender di bidang pertanian?
- » Apakah kegiatan tersebut membutuhkan komponen motivasional untuk mendorong kelompok tersebut agar berpartisipasi?

5. Akses

- » Apakah syarat dan ketentuan kegiatan pertanian akan membatasi atau mencegah kaum perempuan untuk mengakses pinjaman bank, bergabung dalam koperasi, menjual produk, atau menerima pembayaran dalam rangka usaha pertanian?
- » Jika hak perempuan atas properti saat ini tidak setara, dapatkah kegiatan tersebut meningkatkan kesetaraan gender? (Misalnya, jika pengurusan tanah baru diajukan, dapatkah kegiatan tersebut memastikan bahwa kepemilikannya dapat dipegang baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam rumah tangga, atau oleh perempuan bila perempuan merupakan kepala keluarga)
- » Apakah dapat ditetapkan sasaran yang luas untuk input material dan jasa yang

Kiat - 7

Apakah indikator kinerja kegiatan dipilah berdasarkan gender?

bisa diukur kepada kaum perempuan yang terlibat dalam kegiatan secara langsung atau tidak langsung?

Kiat - 8

Dalam menyelenggarakan pelatihan bidang pertanian, harus memperhatikan hambatan mobilitas fisik kaum perempuan,

6. Pembangunan kelembagaan strategi PUG

Dapatkah bantuan teknis disertakan ke dalam program atau kegiatan untuk:

- » Terselenggaranya pelatihan gender, tersusunnya rencana dan formulasi kebijakan/program responsif gender, atau dimungkinkannya lembaga pelaksana mempromosikan partisipasi kaum perempuan dalam kegiatan pertanian
- » Tersedianya spesialis Gender and Development selama implementasi kegiatan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan
- » Terselenggaranya pelatihan mengenai model pembangunan partisipatif (misalnya, cara-cara untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penetapan sasaran dan kegiatan sehubungan dengan usaha pertanian)
- » Mengembangkan basis data gender, jika basis data yang ada sekarang tidak layak untuk perencanaan gender.

7. Kerangka program/kegiatan

- » Apakah asumsi perencanaan (di setiap level kerangka perencanaan atau kerangka kerja logis, misalnya) mengantisipasi hambatan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut?
- » Apakah indikator kinerja kegiatan mengidentifikasi perlunya pengumpulan data dan informasi yang dipilah berdasarkan gender?
- » Apakah kaum perempuan dalam pembagian kerja menurut gender bisa dimonitor dalam hal akses dan pengawasan pada sumber daya?
- » Dapatkah kegiatan memenuhi kebutuhan gender praktis (mendukung dan meningkatkan efisiensi peran produktif laki-laki dan perempuan) dan strategis (meningkatkan kesetaraan gender melalui partisipasi akses, kontrol kaum perempuan terhadap sumberdaya dalam kegiatan tersebut)?
- » Apakah maksud dan tujuan serta sasaran kegiatan secara eksplisit menyebutkan ditujukan untuk kaum perempuan atau mencerminkan prioritas dan kebutuhan kaum perempuan?
- » Apakah kegiatan mengidentifikasi peluang dan manfaat bagi partisipasi kaum perempuan dalam pengelolaan kegiatan, pelaksanaan, serta pengelolaan barang dan jasa masyarakat?
- » Apakah kegiatan mengidentifikasi peluang dan manfaat bagi partisipasi kaum perempuan dalam perubahan kelembagaan yang terencana, peluang pelatihan, pengawasan sumber daya?

Kiat - 9

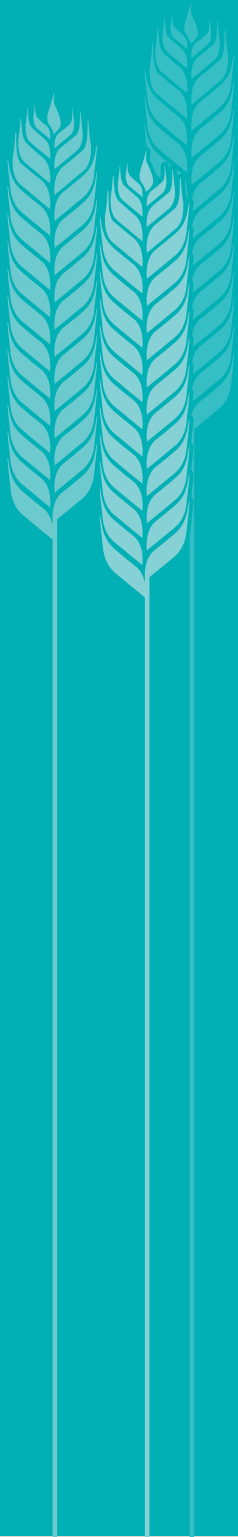
Apa hak hukum yang harus dimiliki dan digunakan kaum perempuan untuk memiliki dan menggunakan lahan untuk produksi pertanian?

- » Apakah kegiatan relevan dan bisa diakses bagi perempuan miskin dalam hal sumberdaya, lokasi dan waktu?

Apakah kegiatan tersebut memasukkan indikator gender yang bisa diukur dengan jelas yaitu untuk mewujudkan kesetaraan gender.

lampiran 3

CONTOH APLIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER DI BIDANG PERTANIAN



DIRJEN PERKEBUNAN

A. TERM OF REFERENCE (TOR)

(Kerangka Acuan Kegiatan)

SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU

DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2010

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :	(018)	Departemen Pertanian
UNIT ORGANISASI :	(05)	Direktorat Jenderal Perkebunan
PROGRAM :	(04.03.08)	Peningkatan Kesejahteraan Petani
KEGIATAN :	(1575)	Pengembangan Magang Sekolah Lapang
SUB KEGIATAN :	(02325)	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- » Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- » Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009
- » UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- » PP No. 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
- » Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/07.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- » APBN tahun Anggaran 2010
- » Inpres No.9 Tahun 2000 tentang keharusan melaksanakan (Pengarusutamaan Gender) PUG disemua sektor pembangunan
- » PMK 119/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan penyusunan,

penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010. Bab 3 PMK 119/2009 menyebutkan Pemerintah mengujicobakan penerapan ARG kepada 7 (tujuh) K/L pada tahun 2010. Ketujuh K/L tersebut, yaitu: Departemen Pendidikan Nasional; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Kesehatan; Departemen Pertanian; Departemen Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

b. Gambaran Umum

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor penting yang menghambat pencapaian sasaran produksi dan kualitas hasil pertanian termasuk tanaman perkebunan. Akibat gangguan OPT produksi menurun dapat sampai pada tingkat yang tidak menguntungkan. Diperkirakan rata-rata 30 % pengurangan hasil dan produksi potensial suatu komoditi disebabkan oleh adanya serangan OPT. Gangguan OPT dapat juga menurunkan kualitas hasil sehingga mempengaruhi harga produk menjadi rendah. Banyak kasus menunjukkan bahwa karena kualitas produk sedemikian rendah dengan masih adanya sisa-sisa serangan OPT, produk-produk perkebunan kita tidak dapat memasuki pasar ekspor.

Usaha-usaha pengendalian OPT pada tanaman perkebunan masih didominasi oleh penggunaan pestisida kimiawi. Penggunaan formulasi-formulasi pestisida yang berspektrum luas yang diaplikasikan secara berlebihan menimbulkan berbagai dampak yang merusak lingkungan. Berbagai species mahluk yang berguna dan bukan sasaran ikut musnah, terjadi pencemaran air, tanah, dan udara. Terdapat residu pestisida didalam hasil pertanian dan gangguan kesehatan pada petani. Dari segi ekonomi teknologi penanggulangan OPT yang demikian merupakan pemborosan yang sangat memberatkan petani dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Usaha-usaha pengendalian OPT tersebut dapat diarahkan melalui tehnik yang lebih efektif, efisien dan berwawasan lingkungan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Salah satu pendekatan agar petani pekebun dapat menerapkan PHT di kebunnya, maka dilakukan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) yang lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku petani laki-laki dan perempuan. SL-PHT bertujuan untuk memberdayakan petani baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kebunnya, sehingga petani laki-laki dan perempuan dapat secara mandiri melakukan PHT dikebunnya.

Selanjutnya, Renstra Departemen Pertanian menyebutkan bahwa pembangunan pertanian umumnya dan perkebunan khususnya dilakukan dengan mengembangkan kegiatan pertanian yang berwawasan kelestarian lingkungan. Untuk itu, rencana

kerja Kementerian Lembaga (Renja KL) Tahun 2010 pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani (03.04.08) terdapat kegiatan Pengembangan Magang Sekolah Lapang (1575). SL-PHT merupakan Kegiatan Prioritas Pembangunan Perkebunan Tahun 2010 yang akan dilaksanakan di 18 provinsi di 36 Kabupaten dengan didampingi masing-masing kabupaten dengan 2 orang petugas lapang, 2 orang petugas dinas dan 2 orang pelatih.

Petani yang telah dilatih SL-PHT melalui Bagian Proyek PHT-PR/IPM-SECP dari tahun 1997 sampai tahun 2005 mencapai 122.610 petani. SL-PHT mulai dilaksanakan pada komoditi yaitu Kakao, Lada, Kopi, Kapas, Teh, Jambu mete. di 13 provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara). Dalam pelaksanaan SL-PHT melalui Bagian Proyek PHT-PR/IPM-SECP ditentukan peserta perempuan harus 20% dari jumlah peserta. {Karena ditetapkan 20%, apakah jumlah 122.610 petani terdiri dari 80% laki-laki dan 20% perempuan?}

Sejak tahun 1997 - 2005 melalui bagian proyek PHT-PR/IPM-SECP dan tahun 2006 – 2008 melalui dana Tugas Pembantuan, telah terlatih petani sebanyak 131.185. Perbandingan peserta SL-PHT perempuan dan laki-laki yang dilatih melalui Bagian Proyek PHT-PR/IPM-SECP maupun Tugas Pembantuan tidak jauh berbeda, walaupun ketentuan jumlah peserta perempuan sebesar 20% tidak diberlakukan lagi untuk APBN. [Jumlah 131.185 petani terdiri dari 80% laki-laki dan 20% perempuan?] Kurangnya keterlibatan perempuan tani dalam SL PHT disebabkan hal hal sebagai berikut:

- » Akses petani perempuan terhadap pelaksanaan SL-PHT yang berlangsung bersamaan waktunya dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga (dari jam 08.00 – 14.00) setiap minggu selama 16 kali pertemuan secara kontinyu;
- » Salah satu kriteria peserta adalah pemilik dan penggarap kebun yang pada umumnya adalah laki-laki;
- » Aktivitas rutin SL-PHT dalam setiap pertemuan adalah pengamatan, analisis agroekosistem, pengambilan keputusan dan tindakan dimana . dalam beberapa kasus, petani perempuan tidak dapat berperan karena keterbatasan fisik dan kesesuaian alat yang digunakan, seperti tindakan pemangkasan, pembuatan rorak, dan penggunaan knapsack sprayer.

Selama kurun waktu sebelas tahun pelaksanaan SL-PHT petani telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan antara lain peningkatan produksi dan peningkatan mutu hasil sampai 25 %, sehingga pelaksanaannya perlu dilanjutkan dengan sumber dana APBN bahkan di beberapa daerah telah dikembangkan dengan memanfaatkan dana APBD Provinsi dan Kabupaten.

Mengingat masih kurangnya jumlah petani laki-laki dan perempuan yang mampu menerapkan empat prinsip PHT dalam pengelolaan kebunnya, serta banyaknya permintaan dari daerah untuk melaksanakan SL-PHT khususnya dari provinsi-provinsi di luar dari 13 provinsi pelaksana program PHT, maka untuk lebih mempercepat pengembangan program PHT yang dimaksud melalui pola SL-PHT kepada petani pekebun, maka kegiatan SL-PHT petani perlu dilaksanakan secara berkesinambungan khususnya pada tahun 2010.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Mempercepat pengembangan program PHT melalui pola SL-PHT kepada petani pekebun dengan merubah perilaku sehingga mampu dan mau melaksanakan 4 prinsip PHT pada usaha kebunnya di provinsi/kabupaten/kota

b. Tujuan

- 1) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petani pekebun melaksanakan 4 prinsip PHT
- 2) Kelompok petani pekebun mampu mengambil keputusan secara mandiri untuk pengelolaan ekosistem kebunnya berdasarkan 4 (empat) prinsip PHT.

3. PELAKSANAAN

Kegiatan SL-PHT mengacu pada Pedoman Umum, dan Pedoman Teknis yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan, Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh Dinas Perkebunan Provinsi serta Petunjuk Teknis yang disusun oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/Kota, yakni:

- a. Persiapan, meliputi identifikasi lokasi, sosialisasi dan penetapan CP/CL yang memberikan peluang yang sama bagi petani laki-laki dan perempuan untuk ikut dalam kegiatan SL-PHT, dengan memperhatikan waktu penyelenggaraan. Keikutsertaan petani laki-laki dan perempuan merupakan hasil kesepakatan bersama dalam keluarga, sehingga memberi peluang bagi petani perempuan untuk berpartisipasi sebagai peserta SL-PHT.
- b. Pelaksanaan pertemuan mingguan selama 16 kali yang kegiatan rutusnya meliputi pengamatan agroekosistem, analisis agroekosistem, pengambilan keputusan dan tindakan serta topik khusus dan dinamika kelompok yang diikuti 25 peserta dengan

memperhatikan kesesuaian peran petani laki-laki dan perempuan. Pertemuan mingguan dipandu oleh dua orang pemandu yang bekerja sebagai tim.

- c. Monitoring dan Evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan untuk perbaikan selama pelaksanaan SL-PHT maupun pelaksanaan tahun berikutnya agar kegiatan ini berkeadilan dan berkesetaraan gender.

4. SASARAN KINERJA

a. Indikator Input

- 1) Penetapan calon peserta SL-PHT (petani pekebun) adalah petani pekebun dengan kriteria setiap kelompoknya 25 orang; yakni petani pemilik atau petani penggarap (laki-laki dan perempuan); berumur 20 – 50 tahun atau sudah berkeluarga; dapat menulis dan membaca; sanggup mengikuti SL-PHT selama 16 kali pertemuan tanpa terputus.
- 2) Petugas SL-PHT bekerja sebagai tim-kerja yang telah mengikuti pendidikan khusus kepemanduan, setiap 2 (dua) kelompok dipandu oleh 2 orang petugas
- 3) Materi / kegiatan SL-PHT mengacu kepada kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta (hasil TNA dan Test Balot Box awal), formulir TNA dan soal Balot Box. Materi tersebut merupakan penjabaran dari pada 4 (empat) prinsip dasar PHT (budidaya tanaman sehat, pengamatan kebun secara teratur (berkala), melestarikan dan memanfaatkan musuh alami, dan petani menjadi ahli PHT.

b. Indikator output

Terlatihnya kelompok tani/petani 70 kelompok tani sebanyak 1.750 petani dengan perbandingan petani laki-laki 75% dan perempuan 25%, sehingga mampu menerapkan empat prinsip PHT yaitu budidaya tanaman sehat, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami, pengamatan secara berkala/mingguan dan petani menjadi ahli PHT.

5. METODE

- a. Koordinasi Dinas Perkebunan Provinsi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota
- b. Identifikasi wilayah / lokasi
- c. Penyusunan jadwal rencana kegiatan penyelenggaraan SL-PHT
- d. Melakukan sosialisasi SL-PHT.
- e. Melakukan pertemuan di tingkat Kecamatan dan Desa
- f. Pertemuan dengan kelompok tani

6. EVALUASI PENYELENGGARAAN SL-PHT DILAKUKAN DENGAN BEBERAPA MODEL YANG TER-DIRI DARI: TEST BALLOT BOX, MATRIK ANALISA PASANGAN TERPERINCI, DAN MATRIK KUALITAS SL-PHT

7. JADWAL KEGIATAN

Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												
		D	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2	PERSIAPAN KEGIATAN	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3	KOORDINASI DENGAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN/KOTA	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4	PENYUSUNAN JADWAL RENCANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SL-PHT	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
5	MELAKUKAN SOSIALISASI SL-PHT.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
6	MELAKUKAN PERTEMUAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

7	PERTEMUAN DENGAN KELOMPOK TANI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
8	PELAKSANAAN KEGIATAN	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
9	MONITORING DAN EVALUASI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
10	PENYUSUNAN DAN PENGGANDAAN LAPORAN:	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

8. BIAYA

Biaya kegiatan SL-PHT Petani bersumber dari dana APBN Tugas Pembantuan, Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menangani bidang perkebunan sebesar Rp. 2.706.380.000,-

Jakarta, Juni 2009
Direktur Perlindungan Perkebunan

Dr. Ir. Herdradjat N, MSc
NIP. 19570228 198403 1 001

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi

: Departemen Pertanian
: Direktorat Jenderal Perkebunan

Program	04.03.08. Peningkatan Kesejahteraan Petani	
Kegiatan	1575. Pengembangan Magang Sekolah Lapang	
Sub Kegiatan	02325	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
Analisis Situasi		<ol style="list-style-type: none">1. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor penting yang menghambat pencapaian sasaran produksi perkebunan.2. Penanganannya perlu diupayakan lebih efisien, efektif dan lebih bersahabat dengan lingkungan, dimana Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan jawaban alternatif dalam mengatasi masalah OPT.3. SL-PHT bertujuan untuk memberdayakan petani baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kebunnya, sehingga mampu secara mandiri melakukan PHT di kebunnya.4. Jumlah petani yang telah dilatih dari tahun 1997 sampai dengan 2008 mencapai 131.185 orang dengan jumlah petani perempuan mencapai 20%. Hal ini disebabkan karena:<ol style="list-style-type: none">a. Dalam pelaksanaan SL-PHT melalui Bagian Proyek PHT-PR/IPM-SECP ditentukan peserta perempuan harus 20% dari jumlah pesertab. Pada saat sosialisasi untuk penetapan CP/CL yang diundang adalah petani pemilik dan penggarap Kepala Keluarga (umumnya laki-laki).c. Kegiatan SL-PHT dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang tidak terputus dan dimulai pada pukul 08.00 hingga 14.00 dengan demikian berarti tidak memperhatikan peran, kebutuhan, kepentingan petani perempuan (isu gender)5. Berdasarkan hasil pengamatan petani perempuan juga berperan dalam pengelolaan kebun, sehingga kepesertaan petani perempuan dalam SL PHT diupayakan tidak dibatasi hanya sejumlah 20%

		<p>6. Tahapan-tahapan pelaksanaan SL-PHT diberikan kesempatan yang sama untuk petani laki-laki dan perempuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Persiapan, meliputi identifikasi lokasi, sosialisasi dan penetapan CP/CL yang memberikan peluang yang sama bagi petani laki-laki dan perempuan untuk ikut dalam kegiatan SL-PHT, dengan memperhatikan waktu penyelenggaraan, dan hasil kesepakatan keluarga. » Pelaksanaan pertemuan mingguan selama 16 kali yang kegiatan rutusnya meliputi pengamatan agroekosistem, analisis agroekosistem, pengambil-an keputusan dan tindakan serta topik khusus dan dinamika kelompok yang diikuti 25 peserta dengan memperhatikan kesesuaian peran petani laki-laki dan perempuan » Monitoring dan Evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan untuk perbaikan selama pelaksanaan SL-PHT maupun pelaksanaan tahun berikutnya agar kegiatan ini berkeadilan dan berkesetaraan gender.
Kegiatan yang direncanakan	Grup Akun 1	SL-PHT Perkebunan di Kabupaten
	Indikator input	Disetiap kabupaten 2 orang petugas lapang, 2 orang petugas dinas dan 2 orang pelatih, sehingga di 18 provinsi, 36 kabupaten teridentifikasi 70 kelompok tani sebanyak 1.750 orang petani laki-laki dan perempuan
	Indikator output	Terlatihnya 70 kelompok tani sebanyak 1.750 orang petani laki-laki dan perempuan di 18 provinsi, 36 kabupaten dengan perbandingan petani laki-laki 75% dan perempuan 25%.
Anggaran		Rp 2.706.380.000,-
	Indikator outcome	Peserta mampu menerapkan 4 prinsip PHT (budidaya tanaman sehat, pengamatan berkala, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami, dan petani sebagai ahli PHT) dalam mengelola usaha kebunnya secara mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan.



